



Kejari Amlapura Bidik Korupsi Pupuk

Tanpa Tender, Total Anggaran Rp 800 Juta

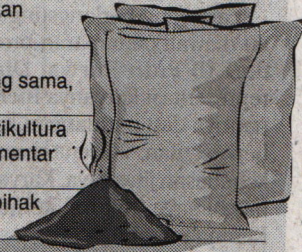
AMLAPURA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura, mencium aroma korupsi pengadaan pupuk organik tahun 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem. Anggaran pengadaan pupuk bau amis itu, mencapai Rp 800 juta. Anggaran APBD Induk sebesar Rp 300 juta, dan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta.

Saat dikonfirmasi, Kejari Amlapura Ivan Jaka MW, didampingi Kasi Pidsus Aditya Okto Thohari, membenarkan hal itu. Disebutkannya, kasus dugaan korupsi ini, mirip kasus korupsi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem, yang menyeret I Gede Sandi (PNS Dishutbun), dan I Wayan Suradika (swasta), ke meja pengadilan Tipikor, Denpasar. "Memang awalnya dari kasus Dishutbun. Kami melihat ada kasus serupa," tegas Aditya Okto.

Sejumlah pejabat di Dinas Pertanian, diakuinya sudah sempat dimintai keterangan. Pun demikian, sejumlah perwakilan kelompok penerima, di empat kecamatan (Kecamatan

BAU AMIS PUPUK ORGANIK

- Kejari Amlapura menduga ada penyimpangan pengadaan pupuk organik tahun 2013.
- Kuat dugaan penerima pupuk ada sebagian yang fiktif. Pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung.
- Dari penelusuran kejaksaan, ternyata pemenang pengadaan selalu orang yang sama, namun berganti perusahaan.
- Pihak Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem enggan berkomentar lebih jauh.
- Beberapa anggota kelompok dan juga pihak dinas mulai diperiksa kejaksaan.



GRAFIS: GT. DEWANTARA/RADAR BALI

Manggis, Rendang, Abang, dan Kubu), juga sudah dimintai keterangan. Cuma, dengan dalih masih dalam penyelidikan, pihak Kejaksaan enggan merinci jumlah pupuk yang menyedot anggaran Rp 800 juta, itu. Yang jelas, menurut mereka, kelompok yang tercatat menerima bantuan pupuk itu, memang benar menerima pupuk, alias tidak fiktif. Prosesnya yang dicurigai menimbulkan kerugian negara.

Ivan Jaka menyebutkan, anggaran pengadaan pupuk ini, diduga tidak direncanakan tahun sebelumnya atau tidak masuk KUA-PPAS. Katanya, anggaran pengadaan pupuk ini, semacam anggaran siluman, yang hangat diributkan di DKI Jakarta. Selain diduga anggaran siluman, Kejari juga mencium, pengadaan pupuk ini melang-

gar Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, tentang Hibah dan Bansos. "Semestinya, proposal dulu. Misalnya, ada kelompok perlu pupuk, baru dibahas, dan dianggarkan," sindir Ivan Jaka.

Di samping itu, proses pengadaan yang melibatkan pihak swasta juga dicurigai ada persekongkolan. Dengan anggaran sebesar Rp 300 juta di APBD Induk, dan Rp 500 juta di APBD Perubahan, semestinya bisa dilakukan tender terbuka. Ini, malah dilakukan penunjukan langsung. "Perusahaan yang ditunjuk, memang berbeda-beda. Perusahaannya berbeda. Orangnya itu-itu saja. Secara teknis, dikerjakan oleh satu orang. Ada indikasi permainan orang dalam (pemerintahan) dengan pihak swasta," tegas dia. (wan/gup)



Kajari; Kami Diam - Diam

Ditemukan Perjalanan
Dinas Fiktif di Denpasar

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sedang diusut oleh tim Kejari Denpasar. Memang dua "jubir" yaitu Humas Pemkot dan Humas Badung membantah ada tim Kejari turun. Namun pihak Kajari Denpasar kemarin memastikan bahwa

► Baca Kajari... Hal 31

Masih Dalam Data-Data di Internal

■ KAJARI...

Sambungan dari hal 21

untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data, dilakukan diam - diam.

"Kami tidak tahu memberitahukan, diam - diam kami mengumpulkan data. Kami sudah dapat beberapa data permulaan atas dugaan kasus korupsi, baik di Denpasar - Kota Denpasar," tegas Kajari Denpasar Immanuel Zebua.

Memang sudah turun, soalnya humas Denpasar dan Badung membantah? Ditanya seperti itu, dia mengatakan tim sudah turun. Dengan mengatakan bahwa tim yang turun tidak harus terang - terangan. "Kan tidak harus terang - terangan, diam - diam juga bisa *toh?*" selorohnya.

Dia mengatakan, saat ini data - data masih didalami dan dimatangkan secara internal. Nantinya dilakukan pengusutan secara tuntas kasus ini. "Kalau sudah ditemukan dua alat bukti, kami akan tingkatkan dengan mengambil langkah penyidikan (ada tersangka). Saat ini biarkan kami bekerja atas data yang kami dapatkan," ungkapnya.

Dari data yang didapatkan koran ini, salah satu misalnya sudah rinci mengatakan, penyimpangan atas hasil pemeriksaan BPK RI. Terkait dengan Pertanggungjawaban perjalanan Dinas Pemkot Denpasar yang tidak didukung bukti memadai. Dijelaskan dalam data itu, bahwa realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 432.473.819.954 (Rp 432 miliar lebih) atau realisasi 90,11 persen dari anggaran sebesar Rp 479.965.974.075 (Rp 479 miliar lebih). Dari belanja barang dan jasa itu, terdapat belanja perjalanan dinas di Kota Denpasar Rp 32.437.260.848 (Rp 32,4 miliar lebih). Hingga

akhirnya dilakukan pemeriksaan selisih harga, secara detail termasuk dikaitkan dengan nukti fisik tiket Garuda Airlines termasuk dengan harga dasar tiket. Ditemukan ada dana yang tidak sesuai Rp 565.553.334 (Rp 565 juta lebih). Atau kelebihan membayar sebesar Rp 565 juta lebih.

Tak hanya itu, pemeriksaan atas 4.982 lembar bukti tiket Garuda Indonesia, senilai Rp 10,4 miliar lebih pada 34 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Juga didapatkan selisih antara bukti fisik tiket sebanyak 933 lembar tiket dengan harga Rp 2,4 miliar lebih. Selain itu juga didapatkan adanya perjalanan dinas yang fiktif dengan nilai Rp 15 juta lebih. Perjalanan dinas fiktif ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Seperti halnya berita sebelumnya, data dugaan kasus korupsi di Badung dan Denpasar masuk Kejari Denpasar. Data itu bersumber dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Wilayah Bali, untuk hasil audit tahun 2013 yang diserahkan tahun 2014. Hasil audit tersebut bernomor 03.A/LHP/XIX.DPS/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan Arman Syifa, M.Acc, AK. Ada dua jenis hasil audit dan penyimpangan - penyimpangan di pemerintahan yang dipimpin oleh Paket Rai Mantra - Jayanegara ini.

Sedangkan untuk Badung, ada beberapa data yang terkumpul. Misalnya penyimpangan di Dispenda, terkait pemungutan pajak. Ada beberapa objek pajak yang ditelusuri kasusnya. Kemudian ada kasus dan BBM yang sudah sempat mengemuka dulu, namun baru ditangani. Dan ada kasus dugaan dana persembahyangan di Pura Gunung Salak yang diduga dikorupsi oleh pimpinannya. (art/yes)

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 21 & 31